

HAMBATAN INTEGRASI KEBINEKAAN: POLITISASI IDENTITAS DAN SENTIMEN PRIMORDIALISME

Jovan Prima Firmansyah

johnrightlead@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN)

Abstract: *This paper is to analyze obstacle to diversity integration by identity and primordialism sentiment politicization. The method used in writing this research is qualitative using literature studies. Data is collected through text review and relevant research results. Data analysis was carried out in the following steps: First, the data that had been collected was classified based on the formulation of the problem under study. Second, analyzing the data that has been studied using content analysis. Third, drawing conclusions accompanied by suggestions based on the results of the analysis that was carried out previously in the first and second steps. Identity politic and primordialism could merge to make diversity integration, nevertheless it also able to transform as obstacle when they're being use as identity and primordialism sentiment politicization. Obstacle to diversity integration, creating conflict that could result to political concensus. Through diversity integration, driving political dynamics to negative or positive effect on building an integration that tested as study on political science.*

Keywords: *Obstacle To Diversuty, Integration, Identity Politicization, Primordialism Sentiment, Conflict, Concensus.*

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan terhadap integrasi kebinekaan melalui politisasi identitas dan sentimen primordialisme. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Data dikumpulkan melalui kajian teks dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: Pertama, data yang sudah dikumpulkan diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang dikaji. Kedua, menganalisis data-data yang sudah dikaji menggunakan analisis isi. Ketiga, pengambilan kesimpulan disertai saran-saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya pada langkah pertama dan kedua. Politik identitas dan primordialisme dapat dipadukan dalam membangun integrasi kebinekaan, namun dapat bertransformasi menjadi hambatan ketika digunakan sebagai politisasi identitas dan sentimen primordialisme. Hambatan terhadap integrasi, menciptakan konflik yang juga kemudian menghasilkan konsensus politik. Melalui integrasi kebinekaan, mendorong dinamika politik yang memiliki efek negatif atau positif dalam membangun suatu integrasi yang teruji sebagai sebuah kajian pada ilmu politik.

Kata Kunci: Hambatan Integrasi, Kebinekaan, Politisasi Identitas, Sentimen Primordialisme, Konflik, Konsensus.

PENDAHULUAN

Kebinekaan adalah suatu hal yang terdapat dalam kehidupan bernegara, merupakan sebuah proses maupun dinamika politik pada tiap masyarakat yang bernegara. Beragam sistem negara, politik, ekonomi, sosial, budaya, etnis, agama, ideologi, gaya hidup, cara berinteraksi, warna yang disukai hingga pemilihan merk telepon pintar yang digunakan, terdapat kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat. Bhineka Tunggal Ika yang berarti Berbeda-Beda Namun Tetap Satu, merupakan semboyan bangsa Indonesia yang dapat digunakan tidak hanya dalam kehidupan bernegara berbangsa, namun juga hubungan antara negara bangsa. Kebinekaan berarti berbeda, namun diintegrasikan melalui harmonisasi kehidupan bernegara dan berbangsa yang beragam dengan jalinan saling menghargai dan setara (Menjaga Kebinekaan Butuh Proses, 2017).

Pada kerangka teoritik, integrasi kebinekaan tidak sekadar dimaknai sebagai tidak terjadinya konflik, sebaliknya sebagai kemampuan sistem politik dan sosial untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Integrasi adalah proses dinamis dengan mensinergikan negosiasi kepentingan, keadilan distributif, serta pembangunan solidaritas kolektif. Dengan demikian, integrasi kebinekaan melalui dialektika antara pluralitas dan persatuan.

Perkembangan demokrasi kontemporer, identitas kolektif dan primordialisme mengalami transformasi melalui suatu ekspresi sosial-kultural menjadi instrumen mobilisasi politik. Identitas Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA) maupun afiliasi budaya tidak lagi dipahami sebagai sumber kekayaan sosial, tetapi di sisi lain dipolitisasi menjadi konflik politik. Politisasi identitas dan sentimen primordialisme dapat menciptakan konflik dengan potensi mengikis kohesi sosial dan melemahkan solidaritas kebangsaan.

Hambatan integrasi kebinekaan melalui politisasi identitas dan sentimen primordialisme terjadi di banyak negara dan bangsa sehingga menciptakan konflik, namun kemudian dapat menghasilkan konsensus politik. Proses integrasi kebinekaan, menjadikan suatu dinamika politik berbangsa dan bernegara menuju integrasi kebinekaan yang teruji. Indonesia mengalami dinamika politik polarisasi berbasis identitas keagamaan dalam konflik sosial dan kontestasi elektoral. Melalui hal tersebut, terdapat pergeseran dari politik kebijakan (policy-based politics) menuju politik sentimen (sentiment-based politics).

Dinamika yang sama juga terjadi di konteks global. Kebangkitan populisme identitas di Eropa dan Amerika Serikat (AS) memperlihatkan bagaimana isu imigrasi dan pengungsi dipolitisasi sebagai ancaman terhadap identitas nasional (Brubaker, 2017). Populisme sebagai ideologi tipis (thin-centered ideology) yang membagi masyarakat menjadi “the pure people” dan “the corrupt elite” (Mudde, 2007). Populisme mengarah kepada politisasi identitas yang terkait dengan sentimen primordialisme. Krisis pengungsi Eropa sejak 2015 menjadi momentum konsolidasi partai-partai kanan populis dengan mempolitisasi permasalahan imigran. Di AS era Pemerintahan Donald Trump 2016-2020 dan semakin menguat 2025-kini, retorika anti-imigran menjadi sentimen meningkatkan elektoral dengan mengikis integrasi kebinekaan. Politisasi identitas dan sentimen primordialisme dibangun mengatasnamakan identitas nasional. Hal ini telah menjadi dinamika global sebagai hambatan terhadap integrasi kebinekaan.

Dalam proses integrasi kebinekaan tidak terlepas dari konflik semakin mendalam bila pemahaman suatu kelompok/masyarakat bersifat kaku dan menetap. Hambatan integrasi kebinekaan dengan adanya konflik politisasi identitas dan sentimen primordialisme yang dikelola dengan baik akan menghasilkan integrasi yang solid sekaligus adaptif terhadap perkembangan dinamika politik.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Data dikumpulkan melalui kajian teks dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: Pertama, data-data yang sudah dikumpulkan diklasifikasi berdasarkan permasalahan. Kedua, menganalisis data-data yang sudah dikaji menggunakan analisis isi. Ketiga, pengambilan kesimpulan disertai saran-saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya pada langkah pertama dan kedua. Penelitian memanfaatkan studi literatur melalui karya tulis yang ada sebagai sumber referensi penulisan penelitian. Analisis dilakukan secara interpretatif-kritis untuk melihat hubungan antara politisasi identitas, sentimen primordialisme, konflik sosial, hambatan serta keberlanjutan integrasi kebinekaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Politik Identitas & Primordialisme

Politik identitas dan primordialisme merupakan konsep kelompok/masyarakat dalam mengidentifikasi diri membangun integrasi serta keberlangsungan yang kuat. Politik identitas dan primordialisme menjadi hambatan integrasi kebinekaan ketika menjadi politisasi. Politisasi dengan tidak mengedepankan kebersamaan, kesetaraan, keberagaman terhadap pihak lain menciptakan konflik dalam membangun integrasi kebinekaan. Membangun integrasi kebinekaan antara lain melalui nilai, budaya politik, ideologi, konstitusi dan negara untuk menjembatani kepentingan bersama yang disepakati sehingga konflik dapat dikelola dengan baik.

Politisasi menurut Pillar membuat segala sesuatu menjadi politik (Kurtz, ed.,2010: 471-472). Maka melalui tema identitas budaya, agama, ras, etnis, gender hingga profesi menjadi politik. Politik yang berhubungan dengan kekuasaan dalam bernegara, menjadi konflik ketika keberagaman identitas mengalami polarisasi yang menguat. Politisasi yang digunakan untuk melakukan keyakinan suatu identitas (budaya, agama, ras, etnis, gender hingga profesi) lebih baik dari kelompok/masyarakat lain, tidak dapat memadukan keberagaman sebagai kesatuan. Politisasi akan menghasilkan konflik yang tidak lagi membangun integrasi kebinekaan dalam bernegara, polarisasi akan menciptakan prasangka, kebencian, disintegrasi antara kelompok/masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo politik adalah beragam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan sistem tersebut (Budiardjo,1998:8). Harold Lasswell berpendapat ilmu politik secara umum merupakan kekuasaan dengan segala bentuk yang terkait di luar dan dalam sistem negara (dalam Rudy, 2003:9), David Easton melihat ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum.

Negara sebagai organisasi kekuasaan, membangun kerjasama, mengendalikan gejala kekuasaan asosial agar tidak menjadi antagonisme membahayakan sekaligus mengintegrasikan kegiatan kelompok/masyarakat tertentu ke arah tercapainya tujuan masyarakat seluruhnya. Negara mengatur masyarakatnya melalui proses sejak keberadaan Codex Hammurabi hingga pemikiran Aristoteles, konstitusi mewujudkan kepentingan seluruh masyarakat. Melalui Magna Charta di Inggris, terdapat pembagian kekuasaan antara Raja dengan para bangsawan (sebagai elit politik saat itu). Pemikiran Machiavelli, pemilik kekuasaan (penguasa) harus memiliki “kekuatan” (singa) dan “kecerdikan” (rubah) dalam mengatur masyarakat, lebih fokus pada tujuan dengan beragam cara (baik atau buruk) untuk mengatur masyarakatnya (dalam Suhelmi, 2004:137-138). Thomas

Hobbes berpendapat *homo homini lupus* (manusia memangsa sesamanya), negara harus seperti *Leviathan* (monster yang menakutkan) menata masyarakatnya demi tercapainya integrasi dan ketertiban. Terdapat pemikiran yang menjadikan penguasa negara harus bersikap keras dalam membangun integrasi dan ketertiban tersebut.

Akan tetapi, pemikiran pada figur penguasa negara kemudian lebih jelas pada pembagian kekuasaan maupun hak masyarakat antara lain dengan *Bill Of Rights* di AS. Terdapat kebebasan hak, membatasi kekuasaan pemerintah (negara), kebebasan memilih bagi masyarakat dan sebagainya. Berkembang juga pemikiran *The Four Freedoms*/Empat Kebebasan sebagai konsep dari Presiden AS Franklin D. Roosevelt. Pemikiran tersebut adalah *Freedom Of Speech*/Kebebasan Berpendapat, *Freedom Of Worship*/Kebebasan Beribadah/Beragama Sesuai Dengan Keyakinan, *Freedom From Want*/Kebebasan Kemiskinan dan *Freedom From Fear*/Kebebasan Rasa Takut (dalam Budiardjo, 1998:121).

Politisasi identitas dan sentimen primordialisme sebagai dinamika politik dapat dilandasi suatu ideologi atau pemahaman tertentu yang diyakini. Dapat juga dilandasi pada hal yang dianggap penting dan baik bagi kelompok/masyarakat sehingga bersifat pragmatis sesuai dengan kepentingannya. Ideologi merupakan sistem gagasan politik, menggunakan tindakan politik, mengatur negara, melakukan gerakan sosial/politik, partai politik, mengadakan revolusi, ataupun kontrarevolusi. Ideologi juga dapat dilatarbelakangi agama dengan liberalisme sebagaimana reformasi Agama Kristen Protestan melalui Martin Luther. Pada perkembangannya, liberalisme fokus pada ide mengenai kebebasan individualitas dan pembatasan kekuasaan negara atas individu. Ideologi berlatarbelakang kondisi ekonomi dalam penguasaan alat produksi, tujuan produksi, kemudian melahirkan kapitalisme, sosialisme dan lainnya. Di Indonesia Pancasila sebagai landasan ideologi pemersatu yang bersifat terbuka dan merupakan nilai yang berasal dari akar bangsa Indonesia sendiri.

Perang Dingin terjadi karena persoalan ideologi, pasca Perang Dingin dikarenakan perbedaan identitas dan budaya. Terdapat perkembangan pemikiran post-kolonialisme dari negara-negara yang mengalami kolonialisme barat (menjadi non-barat). Pada perkembangannya, suatu konflik kini semakin masif melalui globalisasi internet. Politik identitas menjadi hambatan integrasi kebinekaan dengan politisasi identitas.

Politik identitas memiliki kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekuatan berdasarkan latar belakang persamaan (agama, etnis, kelompok, gender dan sebagainya). Di Indonesia politik identitas menimbulkan konflik ketika menjadi politisasi berlandaskan SARA. Persoalan tersebut sebagai dampak otoriterisme masa lalu, kemudian muncul masa reformasi. Antara lain permasalahan dalam pemilihan elektoral, dinamika di masyarakat atau terjadinya konflik Papua, Aceh, Riau dalam persoalan Sumber Daya Alam (SDA), pembangunan yang sebelumnya terpusat dan identitas kedaerahan serta pada Bali di masalah budaya/tradisi (Rozi dkk.,2019). Konflik juga terjadi di wilayah-wilayah lain Indonesia dan kini semakin berkembang menjadi permasalahan pengambil-alihan tanah adat atas nama pembangunan.

Politik identitas digunakan sebagai suatu konsolidasi politik, namun akan berbahaya jika mengedepankan unsur kebencian dan menjadi konsumsi politisasi. Negara, masyarakat, media massa (perilaku media sosial dan akses internet masa kini) memiliki tanggung jawab dalam menjaga nilai kebangsaan, toleransi, kesetaraan untuk membangun/menguatkan nasionalisme kebinekaan. Hambatan integrasi kebinekaan dari politisasi identitas dan sentimen primordialisme adalah persoalan yang tidak hanya menjadi perhatian saat ini, namun juga mendatang.

Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri

(UIN) Jakarta melakukan penelitian mengenai “Kebinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi” (2021). Fokus mengenai toleransi di kalangan responden mahasiswa dan dosen dari beragam kelompok agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan). Sampel penelitian 2866 mahasiswa di 92 Perguruan Tinggi (PT), 673 dosen di 87 PT dari 34 provinsi. Hasil penelitian, 30,16% mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah atau sangat rendah. Sementara itu, 69,83% mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi atau sangat tinggi terhadap pemeluk agama lain. Mahasiswa dari PT Kedinasan (PTK) memiliki toleransi yang lebih tinggi, disusul PT Negeri (PTN), PT Swasta (PTS) dan PT Agama (PTA).

Faktor penting korelasi toleransi mahasiswa di Indonesia, antara lain: mahasiswa yang memiliki pengalaman interaksi sosial dengan kelompok berbeda menunjukkan tingkat toleransi beragama tinggi. Iklim sosial kampus, kebijakan penerimaan dan penghormatan kampus terhadap kelompok bukan mayoritas, sikap toleransi beragama dosen juga memengaruhi toleransi beragama mahasiswa, terutama PTA dan PTS (Riset PPIM UIN, 2021).

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh SETARA Institute bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan survei kondisi toleransi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Survei dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengetahuan baru status toleransi dan juga respons atas dinamika intoleransi yang terjadi dalam beberapa peristiwa, termasuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi derajat toleransi siswa SMA.

Metode pengumpulan data dilakukan oleh surveyor secara tatap muka di Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang. Metode Purposive sampling digunakan untuk menentukan sekolah-sekolah yang dituju. Jumlah sampel sebanyak 947 dengan margin of error 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Penelitian diselenggarakan pada Januari-Maret 2023. Temuan pada pengumpulan data antara lain: tingginya penerimaan perbedaan keyakinan (99,3%), penerimaan perbedaan ras dan etnis (99,6%), empati terhadap kelompok yang berbeda agama/keyakinan (98,5), dukungan pada kesetaraan gender (93,8%) dalam kepemimpinan OSIS merupakan hal positif di kalangan pelajar.

Akan tetapi, ketika diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ideologis, kecenderungan toleransi semakin menurun. Menjawab pertanyaan apakah akan menahan diri melakukan kekerasan dalam merespons penghinaan terhadap agama yang dianut, 20,2% responden menyatakan tidak bisa menahan diri. Sekalipun angka yang bisa menahan diri masih cukup besar di 79,8%. Demikian juga terkait persepsi tentang negara Barat, sebanyak 51,8% responden menyatakan setuju bahwa negara Barat seperti Amerika, Inggris dan Australia dianggap sebagai ancaman terhadap agama dan budaya Indonesia.

Dukungan terhadap persepsi bahwa Pancasila bukan ideologi yang permanen, artinya bisa diganti, juga sangat besar yakni 83,3% responden. Kemudian sebanyak 74,4% responden menyatakan tidak setuju jika agama lain selain agama yang diyakini dianggap sesat, serta kebersetujuan membela agama, termasuk harus berkorban nyawa, di angka 33%. (SETARA Institute, 2023).

Memperhatikan penelitian di atas, integrasi kebinekaan harus mengutamakan pola pikir dan lingkungan toleran sebagai sarana mengantisipasi politisasi identitas dan sentimen primordialisme. Pada survei SETARA Institute mengenai Pancasila bukan sebagai ideologi permanen yang dapat diganti harus menjadi tanda peringatan untuk “membumikan” ideologi Pancasila kepada generasi muda. Dalam membangun integrasi kebinekaan yang teruji, membutuhkan penanaman nilai keberagaman, kesetaraan dan

kebangsaan sehingga tercipta integrasi yang solid dan adaptif terhadap konflik dalam pencapaiannya.

Primordialisme menurut Clifford Gertz menguat dan menunjukkan eksistensinya (dalam Rozi, 2019:5). Primordialisme mengutamakan kepentingan/keberlangsungan kelompok, suku, agama, budaya dan lainnya. Konflik politisasi sentimen primordialisme dilatarbelakangi oleh perbedaan yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya: identitas, ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, namun integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Ikatan seseorang pada kelompok dengan nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Pada satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Sisi lain, sikap ini menjadikan kelompok/masyarakat memiliki sikap etnosentrisme, cenderung melihat budaya lain dari sudut pandang budayanya (Andersen dan Taylor, 2006). Melalui hal itu, etnosentris terbagi dua yaitu Etnosentris Infleksibel sebagai suatu sikap yang bersifat subyektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain dan Etnosentris Fleksibel cenderung menilai tingkah laku individu lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri tetapi juga sudut pandang budaya lain.

Ideologi sebagai solusi merupakan salah satu faktor integrasi kebinekaan, menciptakan pandangan hidup kebenaran yang diaktualisasikan, menghilangkan kesulitan sosial, menghapus kerumitan kultural melalui otoritas politik kuat. Maka mengacu kepada budaya politik masyarakat, terdapat budaya politik militan, yaitu perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik (tidak baik dan menciptakan konflik). Sebaliknya, budaya politik toleransi, fokus pada masalah/ide yang dinilai, mencari konsensus, membuka kerja sama, netral atau kritis terhadap ide dan tidak apriori (Toleransi Dari Pengalaman Sejarah, 2018).

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas budaya politik sikap mental absolut dan akomodatif. Sikap mental absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Tradisi dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan, maka kesetiaan absolut tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru. Perkembangan baru dianggap suatu hambatan berbahaya, harus dikendalikan dan merupakan penyimpangan. Sedangkan, sikap mental akomodatif terbuka menerima hal yang dianggap berharga. Bersedia menilai kembali tradisi yang tidak baik berdasarkan perkembangan kontemporer. Perubahan sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan, mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

Pada hambatan integrasi kebinekaan melalui politisasi identitas dan sentimen primordialisme, etika, moralitas dan norma dimaknai sebagai kesepahaman atas nilai-nilai utama dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, terdapat kelompok yang membangun suatu pandangan “kebaikan bersama” yang kemudian berubah menjadi “kepentingan bersama”. Sekte keagamaan ataupun kelompok berbasis kepentingan tertentu biasanya memiliki pandangan yang bermacam-macam sesuai dengan yang diyakininya. Di AS kelompok Klu Klux Klan fokus pada politisasi identitas supremasi kulit putih dengan mengatasnamakan agama. National Rifle Association (NRA) dalam legalisasi kemudahan kepemilikan senjata api, memicu peristiwa-peristiwa penembakan di AS (Alfian, 2016:521). Di Eropa perkembangan partai politik sayap kanan di Perancis, Italia, Belanda dan negara Eropa lainnya menggunakan isu imigran maupun pengungsi sebagai politisasi identitas dan sentimen priordialisme (CNBC Indonesia, 2024). Dengan

demikian, dibutuhkan pandangan “kebaikan bersama” yang disatukan pada sebuah kontrak sosial yang disebut konstitusi.

Melalui konstitusi, semua pihak terikat padanya, memberi kewenangan negara untuk melakukan upaya-upaya penegakan ketertiban dalam masyarakat. Berkaitan dengan integrasi kebinekaan, nilai-nilai (normatif) yang terdapat tidak hanya permasalahan kesetaraan, kebersamaan, penghormatan atas perbedaan (toleransi), keadilan, kemanusiaan atau penghargaan atas HAM. Akan tetapi, dalam menggunakan kebebasan, tanggung jawab, dan sebagainya dengan tetap mengutamakan kerangka integrasi kebinekaan saling menghargai dan memahami.

Mengelola Politisasi Identitas & Sentimen Primordialisme Sebagai Integrasi Kebinekaan Adaptif Berkelanjutan

Hambatan integrasi kebinekaan juga dipengaruhi proses bernegara yang merupakan hasil dari dinamika politik. Menurut Soltau, negara sebagai alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur/mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Dalam bernegara, Laski melihat masyarakat sebagai kesatuan yang mematuhi, jika perlu dengan paksaan terhadap suatu cara hidup tertentu Budiardjo, 1998: 40-41)

Pilihan hidup masyarakat yang bernegara sebagai integrasi kesatuan membutuhkan suatu panduan keyakinan menuju arah yang dituju, yaitu melalui ideologi. Ideologie dikatakan Antoine Destutt de Tracy sebagai ilmu mengenai pemikiran manusia yang mampu menunjukkan arah benar menuju masa depan. Menurut Thomas Hobbes ideologi adalah cara melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya (dalam Suhelmi, 2004:176). Rumusan ideologi politik merupakan himpunan ide dan penjelasan suatu masyarakat bekerja, menawarkan kesimpulan harmonisasi masyarakat tertentu serta mengatur kekuasaan dan pelaksanaannya.

Harmonisasi kebinekaan dalam masyarakat juga tidak terlepas dari faktor HAM. HAM sebagai hak yang diperoleh sejak lahir, melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, kebebasan hidup layak, kebebasan sama dalam hukum, kebebasan pendidikan dan hak hidup mendasar lain. Sokrates dan Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM, yaitu dengan konsep masyarakat melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang tidak baik dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran (Ibid.:38). Dalam perkembangan hal tersebut sebagai landasan, didukung dengan peran kepemimpinan yang berjalan efektif untuk menjalankan pemerintahan melalui pola perwakilan dan mengedepankan HAM.

John Locke berpendapat keadaan ‘status naturalis’, individu memiliki hak dasar secara perorangan. Dalam kehidupan bersama menjadi lebih maju sebagai ‘status civilis’, individu berkedudukan sebagai warga negara dengan hak dasar dilindungi oleh negara. Menurut Rousseau, kekuasaan negara muncul berdasarkan persetujuan antara seluruh masyarakat dalam membentuk suatu pemerintahan, pihak yang dikuasakan (perwakilan) menjalankan pemerintahan. Pemikiran-pemikiran tersebut menjadikan “Kontrak Sosial” salah satu teori landasan HAM (dalam Budiardjo, 1998:56).

Melalui hal itu, dalam membangun integrasi kebinekaan juga dipengaruhi faktor budaya politik di masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat (dalam Philipus dan Aini, 2011:21). Perwujudan kebudayaan berupa benda/alat yang diciptakan, perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata (perilaku, bahasa, alat penunjang, organisasi sosial, religi dan lainnya) bertujuan memudahkan individu dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Budaya berkembang menjadi budaya politik dalam kehidupan politik bernegara. Budaya politik menurut Austin Ranney sebagai suatu lingkungan psikologis

terselenggaranya konflik/dinamika politik dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Dinamika mencakup kognitif/cognitive orientations dan afektif/affective orientations (Ranney, 1996). Integrasi kebinekaan yang melalui proses dinamika politik dari politisasi identitas dan sentimen primordialisme berhubungan dengan penerapan budaya politik pada sistem politiknya.

Hambatan integrasi kebinekaan dari politisasi identitas dan sentimen primordialisme melalui pasca Perang Dunia (PD) II (mayoritas negara baru yang telah melewati kolonialisme membentuk identitas politik non-Barat), pasca perang dingin, kemudian terjadinya serangan terhadap gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat (AS) 11 September 2001, memiliki pengaruh pada lansekap politik global modern. Menurut Fukuyama, kekalahan komunisme dengan berakhirnya Perang Dingin merupakan hasil universalisasi demokrasi liberal barat (dalam Heywood, 2017:75). Pada perkembangannya memunculkan politik identitas, dikaitkan dengan partikularisme, kebudayaan, etnisitas, lokalitas dan agama. Globalisasi dianggap melemahkan ikatan dan identitas budaya.

Budaya politik, globalisasi, berakhirnya Perang Dingin, politisasi identitas menjadikan integrasi kebinekaan dalam prosesnya dapat menghasilkan konflik melalui politisasi sentimen primordialisme yang juga berkembang. Primordialisme sebagai ikatan seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal bertumbuh dari suku bangsa, daerah kelahiran, ikatan klan, dan agama (Ibid.:291-293). Primordialisme meyakini bahwa nilai yang diperoleh dalam tradisi, adat-istiadat, kepercayaan merupakan hal utama. Politisasi sentimen primordialisme jika cenderung membanggakan suku/ras dan hal lain dengan merendahkan suku/ras dan lainnya.

Dengan demikian dalam membangun konsensus suatu konflik dari proses integrasi kebinekaan dibutuhkan nilai sebagai pandangan dasar terkait dengan aspek moralitas. Emile Durkheim berpendapat nilai sebagai fakta moral dalam masyarakat terdapat semacam kesadaran kolektif (*conscience collective*), menunjukkan terdapat suatu sistem nilai yang menjadi faktor integrasi sosial (Mucchielli dalam Cabin dan Dortier,ed., 2005:46). Menurut Talcott Parsons dan Malinowski dibutuhkan *charter* sosial, bahwa integrasi sosial dapat terjaga melalui sistem nilai utama, norma serta moralitas kebaikan bersama.

Melalui kebaikan bersama, norma, moralitas dan nilai utama, maka menurut Heywood ideologi sebagai rangkaian ide yang menyediakan sebuah landasan bagi aksi politik yang terorganisasi, bertujuan untuk melestarikan, memodifikasi atau menyingkirkan sistem kekuasaan yang ada. Semua ideologi: (1) menyediakan sebuah pembahasan tentang tatanan yang berlaku saat itu, dalam bentuk ‘pandangan dunia’; (2) menyediakan model dari masa depan yang diinginkan, pandangan tentang masyarakat yang baik; dan (3) menggambarkan bagaimana perubahan politik dapat dan harus dilakukan (Heywood, 2017:46).

Menurut Plato, keadilan merupakan hakekat dari alam semesta sekaligus pedoman mencapai kehidupan baik yang dituju. Emile Durkheim mengatakan konsep solidaritas sosial sebagai wujud konsensus masyarakat, hubungan dibangun sesuai dasar moral, agama, kepercayaan, tradisi atau adat istiadat yang diakui dan dianut (Mucchielli dalam Cabin dan Dortier,ed.,2005:46-48). Solidaritas sosial atas dasar konsensus mengikuti perkembangan masyarakat mewujudkan integrasi.

Undang-Undang (UU) disusun melalui “solidaritas” yang mencirikan masyarakat tersebut. Konsensus merupakan bagian organisasi sosial, nilai, norma, peranan, dan lembaga (sebagai instrumen) dalam kesatuan. Terdapat kesepakatan di masyarakat tentang hal baik dan tidak baik serta benar atau sebaliknya. UU bertujuan menciptakan stabilitas, pada perkembangannya jika terdapat banyak penyimpangan, maka UU akan dirancang

sebagai perubahan atau penambahan.

Integrasi tidak hanya terjadi saat kelompok/masyarakat (beragam) beradaptasi dan memiliki toleransi terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun juga tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial pada sistem sosial tertentu, menghasilkan kesepakatan antara kelompok/masyarakat dengan menyatukan unsur berbeda melalui konsensus. Pada titik ini, dibutuhkan peran elit yang dapat menyatukan kelompok/masyarakat tersebut melalui UU yang disepakati melalui konsensus hingga terbentuk solidaritas sosial. Melalui hal itu, keberhasilan integrasi sosial dari William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff saat kelompok/masyarakat berhasil saling mengisi (interaksi sosial menjadi organisasi sosial) dan menjaga kebutuhan satu dengan lain (dalam Philipus dan Aini, 2011:20).

Proses membangun integrasi kebinekaan akan menimbulkan konflik, maka harus dikelola secara baik dengan: Pertama, merancang sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif serta mencari pola penyelesaian konflik berdasarkan tingkat penyelesaian agar tidak meningkatkan eskalasi. Kedua, penetapan peraturan dan prosedur yang konsisten namun terbuka untuk usulan yang tidak ada sebelumnya dengan harmonisasi nilai dan norma. Ketiga, dalam pengelolaan konflik yang baik, peran kepemimpinan merupakan salah satu hal utama dengan membangun kerja-sama baik antara kelompok/masyarakat secara formal maupun informal. Kemudian, mengutamakan integrasi melalui pengembangan toleransi, solidaritas saling pengertian dan sebagainya diantara kelompok/masyarakat tersebut.

Melalui hal itu, integrasi kebinekaan di AS sebagai suatu dinamika politik dapat dicermati dalam prosesnya. AS sebagai negara multi bangsa, membangun integrasi melalui budaya politik yang terjadi meski terdapat perbedaan spektrum dalam dinamikanya. Perbedaan di AS direpresentasikan melalui Partai Demokrat dan Partai Republik, memiliki agenda secara ideologis dan regulasi berbeda, diantaranya penerapan pajak, peraturan berusaha, aborsi, hukuman mati, anggaran sosial, anggaran pertahanan, anggaran kesehatan dan lainnya.

Partai Demokrat dan Partai Republik memiliki banyak perbedaan, namun pada pemilihan presiden AS di 2008 saat Barack Obama dari Partai Demokrat berhadapan dengan John McCain dari Partai Republik (Alfian, 2016:33-34), terdapat “integrasi” pada titik tengah meski tidak sepenuhnya. Partai Republik tidak menyetujui aborsi (Pro-Life/Pro-Kehidupan), sebaliknya Partai Demokrat AS menyetujui aborsi karena dianggap sebagai pilihan (Pro-Choice/Pro-Pilihan). John McCain pernah menyetujui aborsi (terbatas, jika dalam paksaan seksual) yang berarti tidak sepenuhnya sama dengan Partai Republik.

Presiden AS yang terpilih tidak terlepas dari politisasi White, Anglo-Saxon, Protestant (WASP), berarti kulit putih, keturunan Anglo-Saxon, beragama Kristen Protestan. Masih terdapat kelompok/masyarakat AS yang mengedepankan politisasi tersebut. Dalam proses integrasi kebinekaan di AS yang melalui dinamika, terpilihnya John F. Kennedy (JFK) sebagai Presiden menunjukkan mayoritas masyarakat AS mengesampingkan politisasi yang terjadi, JFK meskipun berkulit putih namun merupakan penganut Katolik. Ketika Barack Obama terpilih, keturunan Afrika-Amerika pertama yang menjadi Presiden AS (Ibid., 2016:33). Kemudian Joe Biden yang terpilih juga merupakan seorang penganut Katolik.

Akan tetapi pada perkembangan dinamika politik di AS saat ini dengan terpilihnya Donald Trump pada periode kedua 2025–kini, politik dalam negerinya semakin meruncing politisasi identitas dan sentimen primordialisme dengan kebijakan anti

imigran dan pengungsi di negara itu. Meski lembaga penegak hukum masalah imigrasi AS yang disebut Immigration and Customs Enforcement (ICE) telah ada sejak era presiden-presiden pendahulunya, namun kini dianggap sangat agresif dalam menjalankan tugasnya. ICE diduga melakukan operasi terhadap imigran tanpa dokumen legal (terkadang juga memiliki dokumen lengkap) melalui perbedaan ciri fisik (kulit berwarna), aksen berbicara, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, serta tidak mengutamakan surat pengadilan dan lainnya yang dianggap bertentangan dengan integrasi kebinekaan di negara itu. Tidak hanya itu, tindakan ICE menciderai warga negara AS yang memprotes tindakan ICE terhadap imigran, bahkan yang lebih fatal menewaskan dua warga negaranya sendiri (Kompas Id, 2026). Pada hal lain, Presiden AS Donald Trump mengunggah video rasis pada akun Truth Social miliknya yang menampilkan mantan Presiden AS Barack Obama dan istrinya, Michelle Obama dengan tubuh monyet (detik.com, 2026). Permasalahan-permasalahan itu memicu protes yang besar di AS. Dengan demikian dapat dilihat bahwa proses integrasi kebinekaan di AS memiliki dinamika politiknya. Terdapat konflik dalam prosesnya dan berpotensi mengganggu integrasi kebinekaan melalui politisasi identitas dan sentimen primordialisme. Hal ini akan menjadi suatu proses bagi negara itu bagaimana menjaga integrasi kebinekaan di AS.

Sedangkan di beberapa negara Eropa kemunculan kekuatan partai politik sayap kanan antara lain melalui politisi Marine Le Pen di Perancis, Geert Wilders di Belanda, Georgia Meloni di Italia serta beberapa negara di Eropa lainnya, mengusung politisasi identitas dan sentimen primordialisme melalui kebijakan anti imigran dan pengungsi di negara-negara itu. Meski di Perancis dan Belanda hambatan integrasi kebinekaan tidak mengubah lansekap politik utama, namun di Italia memperoleh momentumnya dengan terpilihnya Meloni sebagai Perdana Menteri (PM) Italia (CNBC Indonesia, 2024). Hal ini menjadikan suatu tanda “nyata” yang harus ditindak-lanjuti sebagai hambatan integrasi kebinekaan di negara-negara Eropa lain, khususnya yang mengedepankan pemikiran demokrasi liberal dan HAM.

Di Indonesia terdapat kebinekaan dalam proses terbentuknya sebagai negara bangsa. Dalam membangun integrasi kebinekaan, Indonesia berpedoman pada Pancasila. Pancasila merupakan ideologi karakter utama, cara pandang, terbuka serta metode untuk mencapai tujuan. Pancasila memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan dalam membangun kepentingan bangsa dan negara.

Akan tetapi, integrasi kebinekaan melalui ideologi akan menciptakan integrasi yang tidak teruji, jika ideologi bersifat tertutup, mutlak, dianggap sebagai kebenaran, tidak boleh menjadi konflik dan wajib dipatuhi. Ideologi tertutup bukan merupakan nilai yang sudah hidup dalam masyarakat (bersifat eksternal). Kelompok/masyarakat dengan ideologi tertutup akan memaksakan ideologinya pada kelompok/masyarakat lain, bukan merupakan kesepakatan bersama. Ideologi akan bersifat totaliter, mengatur semua bidang kehidupan dan cenderung cepat menguasai bidang informasi dan pendidikan sebagai sarana efektif untuk memengaruhi perilaku masyarakat. Keberagaman dan kebudayaan asal dibatasi, hak asasi tidak dihormati serta menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan berkorban bagi ideologi tersebut.

Pada sisi lain, integrasi kebinekaan yang teruji melalui peran ideologi dapat dilihat pada ideologi bersifat terbuka. Nilai dan tujuan tidak dipaksakan dari eksternal, melainkan terdapat dan diperoleh dari masyarakat. Ideologi berisi falsafah kesepakatan kelompok/masyarakat, tidak diciptakan mengatasnamakan negara. Isi ideologi tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya terhadap perkembangan kontemporer. Menghargai kebebasan, keberagaman, kesetaraan, kebersamaan dengan berbagai latar belakang

identitas, budaya, agama dan sebagainya.

Integrasi sosial merujuk pada kondisi di mana individu dan kelompok di masyarakat terikat oleh nilai, norma, dan kesadaran kolektif yang sama. Émile Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sebagai perekat sosial (Emile Durkheim dalam Cabin dan Dortier, ed., 2005:49). Pada perkembangan masyarakat modern yang kompleks, solidaritas organik terbentuk melalui perbedaan fungsi dan hubungan sosial yang saling berhubungan. Dalam konteks negara-bangsa, integrasi sosial melampaui solidaritas sosial; mencakup adanya legitimasi politik dan kepatuhan terhadap konstitusi. Di Indonesia, integrasi kebinekaan menjadikan kesepakatan mengenai nilai dasar yang menopang kehidupan bersama melalui Pancasila.

Primordialisme mengacu adanya ikatan sosial yang terbangun secara alamiah, diantaranya etnisitas, agama, bahasa, dan latar belakang kultur (budaya). Clifford Geertz melihat ikatan primordial sebagai landasan emosional yang kuat berkaitan dengan identitas mendasar individu (Geertz, 1973:255). Pada transformasi demokrasi, identitas primordial dapat menjadi basis representasi politik. Akan tetapi, saat identitas dipolitisasi secara eksklusif dapat menghasilkan polarisasi dan delegitimasi terhadap kelompok lain. Politik identitas menjadi politisasi identitas membangun pemahaman “perbedaan yang tidak sama,” akan menghambat integrasi sosial dan kebinekaan.

Pada dinamika global, teori multikulturalisme menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam negara demokratis (minority rights). Integrasi tidak identik dengan keseluruhan asimilasi, namun adanya pengakuan terhadap perbedaan dalam kerangka hukum setara (Kymlica, 2010). Isu imigran dan pengungsi menjadi permasalahan konsep kewarganegaraan kontemporer. Negara-negara Eropa dan AS menghadapi dilema antara komitmen terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan turbulensi dalam negeri dengan mengatasnamakan kekhawatiran identitas nasional yang terkikis. Politisasi migrasi semakin menguatkan sentimen primordialisme dengan mempersempit integrasi kebinekaan.

Integrasi kebinekaan dalam prosesnya mengedepankan kesadaran multikulturalisme. Menurut Young, multikulturalisme merupakan ide tentang kebersamaan dalam perbedaan. Perjuangan kesadaran kebersamaan Afrika-Amerika di AS pada 1960an hingga kemudian terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden. Di negara-negara Eropa melalui Aufklarung menjadi salah satu pijakan pemikiran liberalisme dan HAM hingga kemudian negara-negara Eropa tersebut menjalankan suatu sistem politik yang dinamis dan berkemajuan bagi masyarakatnya. Di Indonesia dibangun semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan ideologi Pancasila. Multikulturalisme sebagai bentuk komunitarianisme karena berfokus pada kelompok/masyarakat yang melakukan integrasi. Terdapat penghargaan dan pengakuan terhadap keyakinan, nilai dan praktik dari tiap kelompok/masyarakat masing-masing.

Agnes Heller berpendapat, politik identitas sebagai strategi politik yang memfokuskan perbedaan primordial (agama, etnis, ras, kelompok) sebagai ikatan utama. Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di sisi lain dapat memunculkan intoleransi, konflik dan kekerasan (dalam Rozi, 2019:1). Hambatan politik identitas dalam kelompok/masyarakat beragam di Indonesia berkaitan dengan peran elit politik dan partai politik sebagai pihak yang memiliki kekuasaan, kewenangan, pengaruh dalam mengelola konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Politik identitas juga dapat mengatasnamakan demokrasi melalui kompetisi politik yang mengedepankan konsep primordial dengan menggunakan politisasi identitas dan sentimen primordialisme.

Maka menurut Will Kymlica (2010) dibutuhkan homogenisasi ideologi sebagai jangkar utama dalam menyatukan keberagaman. Perlakuan berbeda yang didasarkan pada

SARA, mayoritas, minoritas, merendahkan kelompok/masyarakat lain merupakan bentuk diskriminasi melalui politisasi sentimen primordialisme. Dengan demikian dalam proses integrasi kebinekaan, nasionalisme berfungsi sebagai pemersatu latar belakang kultural dan keberagaman agama. Penggunaan simbol agama (politisasi identitas) lebih diwaspadai daripada konflik akibat faktor lain. Keberagaman telah menjadi realitas yang tidak dapat ditolak, maka negara dibentuk dari konsensus bersama unsur identitas dan primordialisme yang berbeda. Terbentuknya integrasi negara bangsa melalui konflik yang kemudian menjadi konsensus dalam kebinekaan.

Loyalitas berlebihan budaya subnasional dapat mengancam integrasi, politisasi sentimen primordialisme mengurangi loyalitas pada budaya nasional sehingga mengancam keberlangsungan negara. Kencenderungan ini muncul apabila kelompok/masyarakat kultural yang terorganisasi secara politik mengembangkan pola politisasi identitas dan sentimen primordialisme yang dapat mengancam integrasi kebinekaan.

Politisasi sentimen primordialisme berhubungan dengan politik irasional-emosional. Politik dan demokrasi sebagai mekanisme yang baik dalam memilih kepemimpinan menjadi rentan jika politisasi sentimen primordialisme dilakukan. Pemilih menjadi irasional dalam memilih, tidak fokus pada visi, misi dan program, merusak tujuan kesejahteraan umum (*bonum commune*). Hambatan integrasi kebinekaan dari konflik politik melalui politisasi sentimen primordialisme dicampurkan dengan kesetiaan politik dan kesetiaan primordial. Eskalasi konflik akan sulit dikelola ketika politisasi identitas dan sentimen primordialisme yang bersifat laten tumbuh, berkembang dan menguatkan sentimen perbedaan diantara kelompok/masyarakat negara bangsa.

Integrasi kebinekaan sebelum terbentuknya Indonesia saat ini telah melalui perjalanan beragam konflik dan konsensus. Bangsa Nusantara telah hidup dalam kebersamaan yang bernuansa keberagaman melalui *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan bangsa. Merupakan sejarah panjang perjuangan *founding fathers* memadukan keberagaman perbedaan menjadi sebuah integrasi kebinekaan bangsa Indonesia melalui konsensus dengan Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Hambatan integrasi kebinekaan negara bangsa atau global mengarah ke separatisme dan rasisme melalui politisasi identitas dan sentimen primordialisme yang didiamkan, dipelihara dan dikembangkan. Mengatasnamakan fanatisme absolut kebebasan yang berlebihan dengan menggunakan politisasi identitas dan sentimen primordialisme memicu konflik hingga mengakibatkan perpecahan dalam proses integrasi kebinekaan.

Politisasi identitas dan sentimen primordialisme menggunakan ujaran kebencian, berita bohong (*hoaks*), disinformasi meluas semakin cepat untuk memengaruhi opini dan perilaku kelompok/masyarakat. Kecepatan persebaran pada era *Internet of Things (IoT)* dengan media sosial (*medsos*) maupun media massa online yang tidak dapat dipertanggung jawabkan informasinya. Hambatan integrasi kebinekaan dengan politisasi identitas dan sentimen primordialisme menciptakan konflik dari dunia maya berkembang menjadi konflik SARA yang nyata.

Kebinekaan terdapat dalam setiap kelompok/masyarakat negara bangsa. Hambatan integrasi kebinekaan dari politisasi identitas dan sentimen primordialisme akan menghasilkan konflik. Konflik yang terjadi sebagai hambatan integrasi kebinekaan, harus dikelola dengan baik antara lain melalui nilai, HAM, ideologi, konstitusi, negara, budaya politik yang merupakan rumusan kesadaran konsensus filosofi masyarakat terhadap kenyataan pada konteks sosial.

KESIMPULAN

Nilai, ideologi, HAM, konstitusi, budaya politik dan negara merupakan perpaduan dari keberagaman pada integrasi kebinekaan. Melalui pemikiran Durkheim mengenai solidaritas sosial, maka politik identitas dan primordialisme yang berasal dari keyakinan antara kelompok/masyarakat dijadikan konsensus bersama sebagai landasan konstitusional dalam menyelesaikan segala permasalahan kebangsaan integrasi kebinekaan.

Hambatan integrasi kebinekaan dari politisasi identitas dan sentimen primordialisme yang menimbulkan konflik dapat dikelola dengan baik, berpedoman pada tujuan utama berbangsa dan bernegara. Ikatan primordial sebagai landasan emosional yang kuat menurut Geertz, diterjemahkan menjadi kesetaraan, kebersamaan, toleransi dengan saling memahami dan menghargai diantara kelompok/masyarakat sebagai modal perekat membangun negara bangsa dalam integrasi kebinekaan.

Integrasi kebinekaan harus dipahami sebagai proses dialektis yang terus diuji oleh dinamika politik identitas dan primordialisme. Tantangan politisasi identitas dan sentimen primordialisme tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui penguatan institusi demokrasi dan reaktualisasi ideologi terbuka. Di AS dan negara-negara Eropa, kesepakatan bersama dalam pemikiran demokrasi liberal dan HAM melalui pemikiran Kymlica mengenai minority rights, juga bertujuan sebagai Bonum Commune. Pada Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan historis, melainkan prinsip utama yang harus terus dihidupkan sekaligus "dibumikan" dalam praktik politik dan kebijakan publik. Integrasi kebinekaan akan teruji dinamis, ketika konflik dikelola dalam kerangka konstitusional supremasi hukum dan etika publik yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Muhammad A. (2016). *Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan Di Ranah Kekuasaan*. Bekasi: Penjuru Ilmu Sejati.
- Andersen, Margaret L. dan Howard Francis Taylor. (2006). *Sociology: Understanding A Diverse Society*. California: Wadsworth.
- Budiarjo, Miriam. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brubaker, Rogers. (2017). "Why Populism?" *Theory and Society*. Springer.
- Cabin, Philippe dan Jean Francois Dortier (Ed.). (2005). *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Heywood, Andrew. (2017). *Politik Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kymlica, Will. (2010). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Mudde, Cas. (2007). *Populist Radical Right Parties in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Philipus, Ng. dan Nurul Aini. (2011). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada..
- Pillar, Paul R. dan Lester Kurtz (Ed.). (2010). *The Perils of Politicization*. The Oxford Handbook Of National Security Intelligence.
- Ranney, Austin. (1996). *Governing: An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice Hall.
- Rudy, T. May. (2003). *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhelmi, Ahmad. (2004). *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafuan, Rozi dkk. (2019). *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus KeIndonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Internet:

[academia.edu/64791110/Toleransi_Dari_Pengalaman_Sejarah_menuju_Konstruksi_Teoritis](https://ojs.umsida.academia.edu/64791110/Toleransi_Dari_Pengalaman_Sejarah_menuju_Konstruksi_Teoritis)

(diakses 9 Februari 2026)
cnbcindonesia.com/news/20240611103840-4-545571/sayap-kanan-menggila-di-pemilu-uni-eropa-bikin-pening-banyak-pemimpin (diakses 10 Februari 2026)
cnnindonesia.com/nasional/20210302064232-20-612447/rist-ppim-uin-satu-dari-tiga-mahasiswa-di-ri-intoleran (diakses 10 Februari 2026)
detik.com/internasional/d-8345888/hujatan-ke-trump-buntut-unggah-video-rasis-obama (diakses 11 Februari 2026)
infid.org/survei-terbaru-waspada-penurunan-sikap-toleransi-pelajar-sma/ (diakses 11 Februari 2026)
kompas.id/baca/politik/2017/02/21/menjaga-kebinekaan-butuh-proses/ (diakses 12 Februari 2026)
kompas.id/artikel/bagaimana-reaksi-publik-as-setelah-ice-menembak-mati-warga-lagi (diakses 12 Februari 2026)